

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan harga Kabupaten Konawe didasarkan pada informasi Dinas Perdagangan yang dikeluarkan secara mingguan/bulanan
2. Harga rata-rata komoditas daging sapi dan jagung relatif stabil selama 3 (tiga) bulan terakhir dan tidak memiliki gejolak harga yang signifikan.
3. Harga rata-rata komoditas cabai rawit relatif meningkat selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan keterangan sebagai berikut.
 25. Komoditas cabe rawit naik sebesar Rp.25.200 atau 51.64%, kenaikan diperkirakan akibat
 26. Komoditas cabai besar naik sebesar Rp. 16.400 atau 32,16%, kenaikan diperkirakan akibat
 - Komoditas Minyak goreng naik sebesar Rp.1.000 atau 6,25%, kenaikan diperkirakan akibat
1. Harga rata-rata komoditas beras relatif menurun selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan keterangan sebagai berikut.
2. Komoditas beras turun sebesar Rp.1.500 atau 10,71%, penurunan diperkirakan akibat
3. Komoditas bawang merah turun sebesar Rp.6.600 atau 14,04%, penurunan diperkirakan akibat

No	Komoditas	Rata-rata harga April 2024(Rp)	Rata-rata harga Mei 2024 (Rp)	Rata-rata harga Juni 2024 (Rp)
1	Beras	14.000	12.500	12.500
2	Jagung	13.500	13.500	13.500
3	Bawang Merah	47.000	48.000	40.400
4	Bawang Putih	51.000	49.000	46.400
5	Cabai Besar	51.000	66.000	67.400
6	Cabai Rawit	48.800	65.600	74.000
7	Daging Sapi/Kerbau	140.000	140.000	140.000
8	Daging Ayam Ras	32.800	30.400	29.800
9	Telur Ayam Ras	31.700	31.200	28.500
10	Gula Pasir	18.400	19.000	18.200
11	Minyak Goreng	16.000	16.000	17.000

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala yang dihadapi oleh TPID Kabupaten konawe pada pelaksanaan pengendalian inflasi dengan kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) adalah sebagai berikut.

1. Produksi pangan yang tidak merata dan rantai pasok yang tidak efisien akibat infrastruktur pendukung distribusi yang masih terbatas seperti jalan rusak.
2. Infrastruktur pendukung yang masih terbatas dan jaringan distribusi yang belum lancar.
3. Terbatasnya informasi komoditas pangan strategis Sulawesi Tenggara, seperti (1) informasi surplus dan defisit, (2) informasi pola tanam komoditas, (3) informasi kebutuhan dan konsumsi komoditas strategis untuk mendukung arah kebijakan

strategis.

4. Kapasitas produksi yang terbatas akibat teknologi yang terbatas

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pelaksanaan kegiatan operasi pasar pada saat untuk mendorong stabilitas harga

2. *Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada tanggal 1 April 2024*

Bertempat Di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe

- Beras SPHP sebanyak 10.000 Kg x Rp. 10.800

- Minyak Kita sebanyak 1.000 Ltr x Rp. 14.000

- Gila Pasir sebanyak 1.000 Kg x 16.000

- Terigu sebanyak 200 Kg x 12.000

- Telur sebanyak 200 Rak x 52.000

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Perluasan inovasi kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak akibat tingginya harga komoditas pangan saat ini.

2. Mendorong penguatan sarana dan prasarana produksi pangan untuk mendorong tingginya produksi pangan di wilayah

3. Perlunya mengevaluasi kembali jalur perdagangan di wilayah sehingga untuk menentukan skema kerjasama antar daerah ke depan. Jalur perdagangan tersebut termasuk untuk mengurangi keterlibatan agen yang dapat meningkatkan harga.

4. Perlunya penyelerasan program kerja pemerintah daerah dengan rekomendasi dari pemerintah pusat untuk mengendalikan inflasi.

5. Perlunya pemantauan harga dan stok berkala untuk mengidentifikasi kondisi harga dan pasokan komoditas strategis. Saat ini harga dan stok sudah tersedia di, namun kurangnya komunikasi menyebabkan informasi belum dapat digunakan secara lebih komprehensif.

6. Perlunya pendampingan intensif kepada nelayan atau petani untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditas karena saat ini komoditas. Saat ini masih banyak petani atau nelayan yang menanam tanpa melihat kondisi cuaca.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Memperkuat koordinasi antar OPD untuk secara konsisten melakukan pembaharuan data pasokan, kebutuhan, dan harga sehingga dapat menjadi langkah awal dalam menentukan upaya pengendalian kedepan dan memitigasi kemungkinan terjadinya keterbatasan suplai.

2. Memantau keberlanjutan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) sebagai bentuk pengendalian inflasi secara berkelanjutan.

3. Mendorong terbentuknya pasar digital untuk mempermudah pemantauan harga dan pasokan secara berkala, serta mereduksi ketimpangan harga antar daerah.

4. Terus memperkuat sinergi TPID terutama dalam mewujudkan 4K (Ketersediaan

Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) melalui kegiatan sidak pasar, pengembangan komoditas pangan strategis menggunakan teknologi tepat guna, serta pendampingan dan fasilitasi kelompok tani/nelayan untuk meningkatkan produktivitas.

5. Melaksanakan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan